



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
SIDOARJO



# KINERJA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN KEKERASAN PEREMPUAN UNTUK MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE

(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan  
Anak Kabupaten Sidoarjo)

Arum Choirun Nisa

162020100030

Dosen Pembimbing :

Dr. Isnaini Rodiyah, M.Si

Administrasi Publik

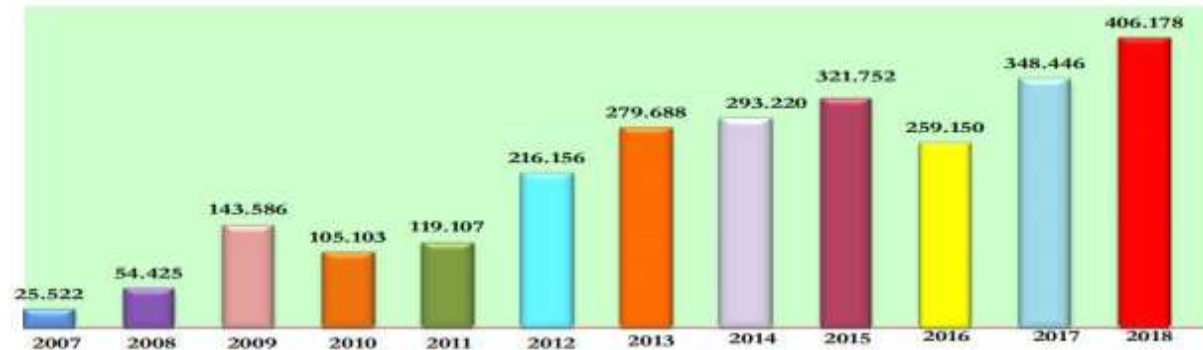
Fakultas Bisnis Hukum Dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2023

# Pendahuluan

## Kekerasan Terhadap Perempuan dari Tahun 2007 - 2018



Sumber : Catatan Tahunan Kekerasan Perempuan 2019

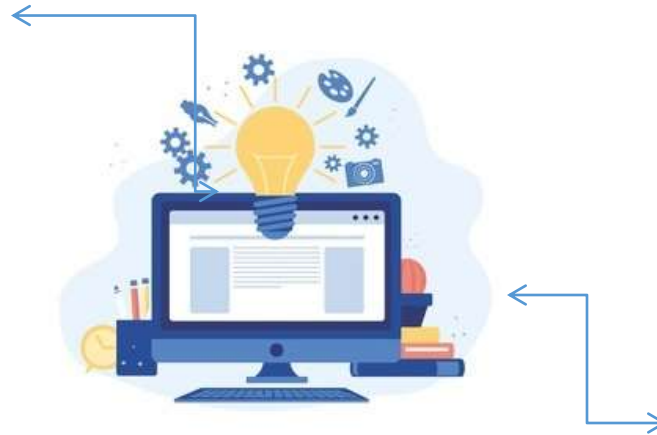
Berdasarkan data di atas melalui Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2019, menjelaskan bahwa jumlah kasus kekerasan perempuan yang dilaporkan pada tahun terakhir, yakni tahun 2018 meningkat 14% dari tahun sebelumnya atau mengalami peningkatan sebanyak 57.732 kasus

Melihat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dan masih rendahnya kontrol masyarakat untuk melakukan pelaporan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, serta guna melindungi warganya dari ancaman tindak kekerasan. Bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan ini adalah di keluarkannya peraturan maupun kebijakan. Salah satu wujud kebijakan tersebut adalah pada tahun 2002 terbentuk lembaga sosial atau organisasi publik yang bernama Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) yang saat ini berganti nama menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

# Pendahuluan

Jumlah Penanganan Kasus dan Target Capaian Kinerja

Tahun	Target Sasaran Kinerja Penanganan Kasus Per Tahun	Jumlah Penanganan Kasus (Realisasi)	Persentase Capaian Kinerja
2017	140 kasus	185 kasus	100%
2018	150 kasus	137 kasus	91,30%
2019	160 kasus	115 kasus	71,80%



## Belum terpenuhinya prinsip – prinsip good governance di UPTD PPA

Berdasar hasil observasi awal ( Oktober 2019) dan didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Wati (2017) serta Aziz (2019) menunjukkan bahwa masih banyak ditemukannya organisasi pemerintah yang belum menerapkan prinsip – prinsip *good governance* secara optimal.

Salah satunya adalah UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo, yang mana UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo belum optimal dalam menerapkan prinsip demokrasi dan partisipasi, menurut Wati (2017) hal tersebut dikarenakan masih banyak ditemukannya masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang belum mengetahui tentang peran dan fungsi adanya UPTD PPA ini, sehingga aspirasi dari masyarakat Kabupaten Sidoarjo kurang tertampung dengan maksimal, permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat kurang terlibat dalam rencana tahunan kinerja UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)



1. Bagaimana kinerja pemerintah dalam penanganan kekerasan perempuan untuk mewujudkan *good governace* di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Sidoarjo?
1. Faktor – faktor apa saja yang memengaruhi kinerja pemerintah dalam penanganan kekerasan perempuan di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo?

# PENELITIAN TERDAHULU

**Zaini Bidaya Dan Rizal Umami “Implementasi Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT) Berkaitan Dengan Pranata Lokal Di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.” (2016).**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang – undang PKDRT di Desa Sokong Kecamatan Tanjung belum berjalan dengan efektif, hal tersebut dikarenakan masyarakat Desa Sokong jarang menggunakan Undang – undang ini untuk menyelesaikan kasus PDKRT, Masyarakat / Warga Desa Sokong dalam menangani kasus – kasus kekerasan, khususnya kasus KDRT lebih senang menyelesaikan secara kekeluargaan atau di selesaikan melalui hukum adat, hal ini dikarenakan kebiasaan turun temurun yang di wariskan.

**Abdul Aziz “Persepsi Masyarakat Kecamatan Samka Terhadap Pelaksanaan Prinsip – Prinsip *Goodgovernance* Pemerintah Kecamatan Samka Kabupaten Tanggamus.” (2019).**

Hasil penelitan ini menunjukkan bahwa prinsip transparasi berada dalam kategori sedang dikarenakan akses informasi yang di perlukan masyarakat Samka masih terbatas, kemudian masih rendahnya soisaliasi yang dilakukan pemerintah terkait informasi – informasi dan kebijakan yang akan di laksanakan. Sedangkan pada aspek akuntabilitas pemerintah bertanggung jawab atas kinerjanya hal ini di karenakan sudah sesuai dengan visi misi organisasi, akan tetapi masih di temukan nya biaya tambahan untuk mempelancar proses administrasi dan pemerintah kecmatan samka masih belum maskimal dalam melaporkan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Terakhir pada prinsip partisipasi masyarakat masyarakat samka masih kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan akibatnya kebijakan atau program yang ditempuh oleh pemerintah daerah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari ketiga prinsip – prinsip *good governance* dapat dikatakan pemerintah kecamata samka masih belum menerapkan prinsip – prinsip *good governace* secara optimal.

**Ida Ayu Arina Mahadewi dan Asri Dwija Putri “Pengaruh Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pada Rumah Sakit Di Kota Denpasar, (2019).**

Hasil yang di peroleh dalam penelitian ini adalah bahwa seluru prinsip – prinsip *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja pada kinerja organisasi dalam hal ini Rumah sakit. Adapun prinsip – prinsip yang berpengaruh terhadap kinerja adalah prinsip transparasi, akuntabilitas, kewajaran, independensi serta responsibilitas. Hasil penelitian ini juga membuktikan dengan menerapkan prinsip – prinsip *good governance* kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat sekitar terhadap rumah sakit semakin baik.

# METODE PENELITIAN

**JENIS PENELITIAN**  
DESKRIPTIF KUALITATIF

**TEKNIK PENGUMPULAN DATA**  
observasi, wawancara, dan dokumentasi dan studi pustaka

**TEKNIK ANALISIS DATA**  
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan

## LOKASI PENELITIAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SIDOARJO

**TEKNIK PENENTUAN INFORMAN**  
Teknik purposive sampling

Fokus penelitian ini yaitu

- 1) pengukuran kinerja dalam mewujudkan good governance menurut sedarmayanti (2009) mengenai landasan teori good governance sebagai berikut : a) akuntabilitas, b) transparansi, c) partisipasi
- 2) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Atmosoetopo dalam tangkilisan (2007) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal

# Hasil dan Pembahasan

## AKUNTABILITAS

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, dalam hal ini akuntabilitas atau pertanggungjawaban UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo dilakukan melalui tiga arah, yang pertama pertanggung jawaban kepada masyarakat dan yang kedua pertanggungjawaban kepada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan ketiga kepada kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

# Hasil dan Pembahasan

1. akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan mulai dari sosialisai, penyediaan informasi, dan melakukan penanganan kasus kekerasan, karena pada dasarnya visi uptd ppa kabupaten sidoarjo adalah mengupayaka pembangunan yang berkeadilan dalam rangka penegakan hak asasi manusia (HAM) bagi perempuan dan anak di kabupaten sidoarjo. Akan tetapi pertanggungjawaban uptd ppa kepada masyarakat dalam penggunaan sumberdaya dalam hal ini sumberdaya anggaran belum berjalan dengan maksimal dibuktikan dengan tidak adanya informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran, sehingga masyarakat Kabupaten sidoarjo tidak mengetahui penggunaan dari anggaran APBD tesebut.
2. akuntabilitas atau pertanggungjawaban UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo kepada pemerintah dalam hal ini kepada dinas DP3AKBi berupa Laporan Pertanggung jawaban, yang mana pertanggungjawababn dilakukan melalui dua cara, yakni pelaporan secara offline dan pelaporan secara online, pelaporan secara offline dilakukan secara tertulis dimana laporanya berupa Laporan pertanggung jawaban (LPJ) dilakukan selama empat kali dalam setahun atau yang sering disebut dengan laporan *three* bulanan
3. Akuntabilitas kepada kementrian perlindungan perempuan dan anak pertanggungjawban dilakukan secara online melalui aplikasi sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI PPA) adapun pelaporan yang termuat dalam SIMFONI PPA



# Hasil dan Pembahasan

## TRANSPARASI

Transparasi berkaitan dengan keterbukaan dan ketersediaan informasi yang di tujukan kepada publik, dimana informasi tersebut harus disampaikan secara jujur dan terbuka serta informasi yang disediakan harus jelas dan lengkap.

Trasparasi juga berkaitan erat dengan keterbukaan akan informasi mengenai pemanfaatan maupun pengelolaan sumberdaya. dalam hal ini trnsparasi kinerja UPTD akan sumberdaya ini dibedakan mejadi dua yakni transparasi sumberdaya manusia dan trasnparasi sumberdaya finansial.

# Hasil dan Pembahasan

## Trasparasi mengenai kejelasan informasi

Informasi Informasi tentang penggunaan maupun pengelolaan sumber daya manusia dan kegiatan kegiatan yang akan atau sedang di lakukan bisa di dapatkan melalui bagian pengadministrasian dan pada saat sosialisai, akan tetapi informasi mengenai pemanfaatan sumberdaya finansial belum berjalan dengan maksimal dibuktikan dengan tidak adanya informasi yang jelas mengenai penggunaan anggaran, sehingga masyarakat Kabupaten sidaorjo tidak mengetahui penggunaan dari anggaran APBD tersebut.

## TRASPARASI MENGENAI KEMUDAHAN AKSES INFORMASI

Berdasar hasil temuan akses informasi hanya bisa didapatkan jika masyarakat menemui bagian administasi umum, atau melalui brosur-brosur, hal tersebut dikarenakan UPTD PPA belum mengguankan media teknologi untuk memberikan informasi secara mudah, dikarenakan belum adanya rencana anggaran yang ditujukan untuk membuat webside, di mana hal tersebut mengidentifikasi bahwa belum mudahnya akses informasi mengenai segala kegiatan yang menyangkut visi, misi dan tujuan UPTD PPA masih tergolong berada level rendah, hal tersebut berdasar pendapat yang dikemukakan oleh Hasan (2019) yang menyatakan bahwa level transparasi tertingi adalah adanya penggunaan media teknologi, sedangkan level trasparasi terendah adalah informasi didapatkan secara langsung

# Hasil dan Pembahasan

## PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi masyarakat dalam kinerja pemerintah dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat pada setiap kegiatan pemerintah, dalam hal ini mencakup keterlibatan masyarakat pada perencanaan dan pengambilan keputusan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, terakhir partisipasi masyarakat dalam evaluasi.

# Hasil dan Pembahasan

1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan  
Masyarakat tidak dilibatkan karena hanya dilakukan melalui rapat internal
2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan : sudah berjalan dengan baik karena masyarakat ikut menerima manfaat atas penggunaan dan perbaikan sarana prasarana
3. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi : masyarakat terlibat dalam evaluasi kinerja karyawan, hal tersebut dikarenakan adanya kuisisioner survey kepuasan masyarakat, yang diberikan kepada korban yang telah menggunakan layanan uptd ppa

# Hasil dan Pembahasan

## Faktor pendukung dan penghambat

### Faktor pendukung

1. Adanya regulasi yang jelas
2. Adanya dukungan pemerintah lintas sektor
3. Adanya dukungan anggaran
4. Adanya komitmen yang tinggi dari tiap pegawai. Dalam menangani korban kekerasan

### Faktor penghambat

1. Terkadang ada selisih paham antar lintas sektor mengenai penanganan yang harus dilakukan
2. Tekanan dari masyarakat yang ingin kasusnya segera selesai, padahal setiap kasus penanganan berbeda beda
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor.

# KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan tentang kinerja pemerintah dalam penanganan kekerasan perempuan untuk mewujudkan *good governance* (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sidoarjo) serta menyandingkannya dengan kenyataan dilapangan, sehingga bisa didapatkan kesimpulan sebagai berikut 1) Akuntabilitas, kinerja UPTD PPA sudah baik hal ini dapat di lihat dari pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan mulai dari sosialisai, penyediaan informasi, dan melakukan penanganan kasus kekerasan, karena pada dasarnya visi UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo adalah mengupayaka pembangunan yang berkeadilan dalam rangka penegakan hak asasi manusia serta adanya laporan pertanggung jawaban, kepada dinas dan kepada kementerian perlindungan perempuan dan anak berupa laporan *three* bulanan dan laporan yang termuat dalam aplikasi sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI PPA). 2) Transparansi trasnparasi dari kinerja UPTD PPA masih belum berjaan dengan optimal atau berada pada level rendah, hal tersebut dikarenakan dalam transparsi kepada masyarakat, masyarakat masih sulit untuk mendapatkan akses informasi, dikarenakan menginformasikan visi mis dan tujuan UPTD PPA belum menggunakan teknologi sebagai media untuk menginformasikan kinerja maupun kegiatan UPTD PPA. 3) partisipasi masyarakat dalam hal ini kinerja uptd ppa dalam partisipasi masyarakat juga blm berjalan dengan optimal, hal tersebut dikarenakan tidak adanya forum masyarakat untuk menampung parisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran, perencanaan kegiatan, serta tidak adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi atas penggunaan sumberdaya.
- Faktor pendukung kinerja unit pelaksana teknis daerah perlindungan peermpuan dan anak (UPTD PPA) dalam menangani kasus adalah, adanya regulasi,adanya dukungan dari pemerintah berupa anggaran,adanya dukungan dari berbagi instansi seperti kepolisian dan rumah sakit, dan dinas sosial adapun Faktor pengambat kinerja UPTD PPA dalam menangani kasus kekerasan adalah masih sering teradi selish paham antar pendamping hukum dan pihak kepolisian (PPA) Porles) dalam menyelesaikan permasalahan, kurang terbukannya masyarakat dalam menyampaikan permasalahan kepada UPTD PPA.

# REFERENSI

- Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Komisi Nasional Perempuan. (2019). Korban bersuara, data berbicara sahkan RUU penghapusan kekerasan seksual sebagai wujud komitmen negara. Jakarta : Catatan Tahunan Kekerasan Perempuan. (*On Line*) [.https://www.komnasperempuan.go.id/File/Catatan%20tahunan%20kekerasan%20terhadap%20perempuan%202019.Pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/File/Catatan%20tahunan%20kekerasan%20terhadap%20perempuan%202019.Pdf) (Diakses Tanggal 6 Oktober 2019).
- Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan. 2019. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik. Jakarta : Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (*On Line*) [Http://ditjenpp.kemendukham.go.id/Hukum-Pidana/647-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-Kdrt-Persoalan-Privat-Yang-Jadi-Persoalan-Publik.Htm](http://ditjenpp.kemendukham.go.id/Hukum-Pidana/647-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga-Kdrt-Persoalan-Privat-Yang-Jadi-Persoalan-Publik.Htm)(Diakses Tanggal 6 Oktober 2019).
- Mashun, M. (2006). *Pengukuran kinerja sektor publik*. Yogyakarta : Penerbit Bpfe- Yogyakarta.
- Wati, E.R. (2017). Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo pasca berlakunya Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004. Senaspro. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Zaini Bidaya Dan Rizal Umami “Implementasi Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT) Berkaitan Dengan Pranata Lokal Di Desa Sokong Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.” (2016)
- Handi Yuniar Lestiawan dan Bambang Jatmiko “ Key Success Factor Government Governance Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah (Survey pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)” (2016).
- Dedy Afrizal “Analisis Kinerja Birokrasi Publik Pada Dinas Sosial Kota Dumai” , (2018)

# REFERENSI

- Ida Ayu Arina Mahadewi dan Asri Dwija Putri “Pengaruh Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pada Rumah Sakit Di Kota Denpasar, (2019).
- Aziz, A. (2019). Persepsi masyarakat Kecamatan Samka terhadap pelaksanaan prinsip – prinsip *good governance* Pemerintah Kecamatan Samka Kabupaten Tanggamus. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2007. *Metode penelitian Kulitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Cv Alfabeta
- Sedarmayanti. (2007). *Sumber daya manusia dan produktivitas kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Tangkilisan, H.N.S. (2007). *Manajemen publik*. Jakarta : Pt.Grafindo Persada
- Lupiyoadi, Rambat. 2013. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta : Salemba Empat
- Moleong, Lexy J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakary.
- Bagian Humas Dan Protokol. (2017). Pengertian, prinsip dan peneraan good governance di Indonesia. Kabupaten Buleleng. (*On Line*) <https://Buleleangkab.Go.Id>. (Diakses Tanggal 24 Oktober 2019).
- Peraturan dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa
- Afrizal, D. (2018). Analisis kinerja birokrasi publik pada Dinas Sosial Kota Dumai. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*. 13, (1), 53-62.
- Musanif, A. (2018). Penerapan pronsip – prinsip good governance dalam praktik otonomi desa (Studi Kasus Di Desa Wanareha Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo). Skripsi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta : Rineka Cipta





**TERIMA KASIH**